

**Pengaruh Tata Kelola Publik, *Intergovernmental Revenue*, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur)**

Afrizal Tahar<sup>a</sup>, Muchlis Aditya Prayoga<sup>b</sup>  
Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Indonesia<sup>a,b</sup>  
afrizal@umy.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Tata Kelola Publik, *Intergovernmental Revenue*, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan subjek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jenis data berupa data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 130 responden dengan kriteria tingkat kepala baik kepala OPD, sekretaris, bendahara, kepala bidang/bagian, serta kepala subbidang/subbagian/seksi dari sekretariat, kantor, badan, dan dinas yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas; *Intergovernmental Revenue*; Kompetensi; dan Kinerja Pemerintah Daerah.

*The Influence Of Public Governance, Intergovernmental Revenue, And Competence On The Performance Of Local Governments  
(Empirical Study On Regional Apparatus Organizations In East Lombok Regency)*

**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of public governance, intergovernmental revenue, and competence on local government performance. This research object was the regional government of East Lombok Regency with the research subject, namely the Regional Apparatus Organization (OPD). The type of data was the primary data obtained by disseminating questionnaires. In this sample research, a total of 130 respondents was involved with criteria for the head of the OPD, secretary, treasurer, heads of divisions/sections, and subdivision/subsection/section heads from the secretariat, offices, agencies, and organizations, selected employing a positive sampling method. The analysis model utilized was a multiple linear regression.

**Keywords:** Transparency; Accountability; *Intergovernmental Revenue*; Competence; and Performance of Local Governments.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2008 mengatur mengenai desentralisasi fiskal atau penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) dan otonomi daerah. Desentralisasi dapat diwujudkan sebagai proses pelimpahan wewenang atas perkara politik, fiskal serta pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada Pemda (Isufaj, 2014). Desentralisasi ini diharapkan menghasilkan manfaat yaitu meningkatkan kreativitas masyarakat dalam hal pembangunan, meningkatkan partisipasi, dan prakarsa, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di seluruh daerah yang didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Mudhofar dan Tahar 2016).

Hasthoro dan Sunardi (2016) menyatakan prinsip-prinsip tata kelola menyangkut dua sisi yaitu transparansi dan akuntabilitas publik. Penerapan transparansi dan akuntabilitas ini menekankan kepada suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan suatu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan cukup terkait kebijakan-kebijakan publik serta proses pembuatannya kepada masyarakat umum (Setiawan dan Safri 2016). Menurut Jitmau, dkk (2017) apabila menetapkan mekanisme akuntabilitas, maka perlu adanya manajemen kinerja yang baik. Penerapan konsep transparansi serta akuntabilitas dalam

proses pengelolaan keuangan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang nantinya akan berpihak kepada masyarakat umum dengan mengaitkan berbagai aturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya (Wiguna dkk., 2015)

*Intergovernmental* (dana perimbangan) yaitu dana transfer berasal dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang nantinya dana tersebut digunakan untuk membiayai program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah (Simbolon dan Kurniawan 2018). Kebijakan pemerintah daerah dalam realisasinya masih banyak mengalami persoalan dan sejumlah kendala dalam implementasinya yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas maupun sumber daya alam serta aturan pelaksanaannya yang berubah-ubah yang diakibatkan oleh kepentingan individu lebih dominan dari pada kepentingan suatu instansi atau lainnya. Pengelolaan anggaran pada OPD tidak terlaksana dengan baik, nilai persentase pegawai yang memiliki kompetensi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebesar 11,55% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 19,85% pada setiap instansi pemerintahan kota dengan jumlah dana perimbangan yang sangat besar yaitu Rp. 1.994.920.467.773, rerata dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 1.372.431 dengan persentase 9,94%. Dana perimbangan pada tahun 2017 yaitu Rp. 2,036 triliun dan pada tahun 2018 Rp. 1,147 triliun. Kinerja pemerintah daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan teori keagenan, penelitian Kholmi (2010) memaparkan bahwa teori keagenan adalah teori yang berupaya untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam kontrak yang merubah sebuah metode dalam pengukuran akuntansi dan berpendapat bahwa *agent* dapat bertanggungjawab kepada *principals*. Terdapat keterkaitan pada hubungan pemerintah dengan masyarakat yang berperan sebagai *agent* dan *principals* dimana pemerintah daerah (*agent*) memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan hasil yang baik serta kinerja yang baik pada masyarakat.

Pengelolaan serta pelaporan aset tetap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum mencapai target. Terkait fenomena tersebut, diduga banyaknya program-program yang tidak terlaksana dengan baik serta sejumlah anggaran proyek yang disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan tertentu. Suatu kinerja pemerintahan apabila telah melakukan dan menyelesaikan setiap program yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian hasil yang maksimal dan output yang nyata maka dapat dikatakan kinerja tersebut terlaksana dengan baik (Purnama dan Nadirsyah 2016). Penelitian terkait fenomena telah dilakukan oleh Setiawan dan Safri (2016) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Bandung memperoleh hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. penelitian Hasthoro dan Sunardi (2016) menyatakan transparansi serta akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemda. Adapun penelitian Fatimah (2017) menyatakan bahwa kontribusi *intergovernmental* sangat signifikan pada daya dorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok timur.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Negara demokrasi memiliki sebuah hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah, hubungan keagenan juga dapat dilihat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian dimana ada satu maupun lebih pihak prinsipal yang mempekerjakan agen dan diharapkan agen dapat melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan tugas mensejahterakan masyarakat daerah, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kepada pemerintah pusat. Putra, dkk (2018) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diberlakukan pada berbagai jenis organisasi termasuk pada sebuah organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah serta berfokus pada persoalan mengenai asimetri sebuah informasi yang terjadi antara pemerintah sebagai (*agent*) dan masyarakat (*principals*).

### **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Dalam penelitian yang berjudul *Job Market Signalling* Spence (1973) menyatakan teori sinyal yang berisi mengenai bagaimana organisasi memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan terkait penyusunan anggaran yang diperlukan untuk melakukan atau menentukan sebuah kebijakan. Dirgayusa dan Suardikha (2017) pihak yang memberikan informasi bisa menentukan apa dan bagaimana informasi diberikan dan pihak yang menerima informasi dapat memilih bagaimana untuk menginterpretasikan informasi yang diterima merupakan pengertian dari teori sinyal. Penekanan pada teori tersebut terdapat pada pentingnya informasi yang dihasilkan oleh instansi pemerintah terhadap suatu keputusan untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada masing-masing unit (Butar, 2014).

### **Konsep *Money Follow Function***

Konsep *money follow function* diharapkan dapat berdampak baik bagi keuangan pemda yang ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004. Konsep tersebut memaparkan pengalokasian suatu anggaran harus berdasarkan kegunaan dari unit pada sebuah organisasi pemerintah yang bertujuan untuk membangun sebuah konsep penganggaran biaya sehingga efektif, efisien, dan memelihara kesinambungan fiskal dengan usaha peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah (Ningsih dkk., 2018). Dalam penelitian Ningsih dkk (2018) mengatakan bahwa konsep *money follow function* tidak hanya membagi sebuah anggaran terhadap setiap unit organisasi secara menyeluruh namun tetap ada suatu proses penilaian pada usulan sebuah program atau kegiatan yang akan dilaksanakan setiap lini organisasi.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pemerintah wajib untuk memberikan informasi laporan keuangan yang dijelaskan dalam teori sinyal pada pihak luar yang ditimbulkan oleh asimetri informasi yang terjadi karena adanya hubungan *agent* dengan *principals* di mana informasi yang diberikan di respon sebagai sinyal positif atau negatif oleh masyarakat (Novalia dan Nindito 2016). Dalam penelitian Fernandes (2015) mengatakan bahwa transparansi memiliki arti sebagai tersedianya suatu informasi yang cukup, tepat waktu dan akurat mengenai kebijakan publik, perencanaan dan proses pembentukan kebijakannya. Keterbukaan dan kejelasan menyampaikan sebuah informasi yaitu informasi yang diberikan benar, tepat waktu dan lengkap untuk semua pihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan (Yuliafitri dan Khoiriyah 2016).

Adanya keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran akan mewujudkan suatu kepercayaan atas hasil laporan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang nantinya dapat mempengaruhi baik atau buruknya kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Dalam penelitian Jitmau, dkk (2017) serta Setiawan dan Safri (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pemerintah dan masyarakat yang dijelaskan dalam teori keagenan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan pengelolaan pemda dilakukan guna memastikan jika pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan berlaku (Yuliani dan Wiraseda, 2016). Akuntabilitas dimaknai dengan prinsip bahwa pengelola mempunyai kewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Yuliafitri dan Khoiriyah 2016).

Penetapan perundang-undangan mengenai konsep akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran diharapkan mampu menghasilkan suatu kinerja berkualitas dan baik dalam pemerintah daerah serta

berpihak kepada masyarakat (Jitmau dkk, 2017). Dalam penelitian Setiawan dan Safri (2016) serta Purnama dan Nadirsyah (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

H<sub>2</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengalokasian suatu anggaran wajib berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam sebuah organisasi pemerintah yang dijelaskan pada konsep *money follow function* bertujuan untuk membangun sebuah konsep penganggaran biaya yang efektif dan efisien (Korompot dan Warongan 2017). Pengelolaan pendapatan daerah yang baik akan menciptakan hasil yang maksimal terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) studi pada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengenai variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan hasil yang positif memengaruhi kinerja keuangan pemda. Hal ini diharapkan dapat mendorong pemda untuk meningkatkan kinerja yang merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak luar. Dalam penelitian Nisa dan Nor (2018) serta Maiyora (2015) menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah.

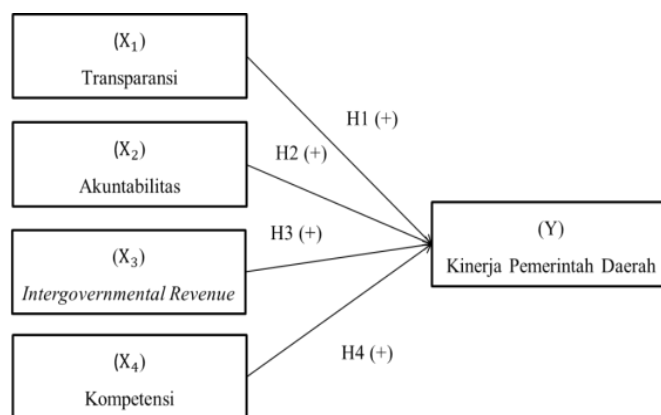
H<sub>3</sub>: *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### Pengaruh kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ratih dan Damayanthi (2016) menyatakan bahwa *signalling theory* menjelaskan mengenai bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi tentang kinerja pemerintah daerah, dimana untuk menyusun informasi mengenai laporan anggaran perlu kemampuan dari setiap individu dalam mengelola anggaran yang akan dialokasikan disetiap perencanaan kebijakan pemerintah daerah. Kompetensi SDM menjadi hal yang penting dalam mengelola dan menyajikan sebuah informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu (Pujanira dan Taman 2017). Penelitian Pujanira dan Taman (2017) serta Safwan, dkk (2014) menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Maheldi (2016) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai merupakan faktor pendukung tercapainya penyelesaian suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien sehingga kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H<sub>4</sub>: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk subjek dalam penelitian adalah pejabat pemerintah pada sekretariat, kantor, badan, dan OPD pada Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel dengan kriteria pejabat pemerintah yang terdiri dari tingkat kepala baik kepala OPD, sekretaris, bendahara, kepala bidang/bagian, dan kepala subbidang/subbagian/seksi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner serta diukur dengan skala likert 1-5.

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kuesioner disebar pada 28 OPD di Kabupaten Lombok Timur yaitu sekretariat, kantor, badan, dan dinas dengan masing-masing OPD mendapat 5 buah kuesioner. Sebanyak 135 kuesioner diberikan kepada responden dan kuesioner yang kembali adalah 130 kuesioner atau sebesar 96,43%. Terdapat 2 kuesioner dengan jawaban yang tidak lengkap dan 3 kuesioner tidak memenuhi kriteria responden. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sejumlah 130. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 92,73%.

Tabel 1. *Statistik Deskriptif*

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std.
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Deviation
T	130	9	45	27	24	45	40,02	5,259
A	130	9	45	27	23	45	39,15	5,239
IR	130	3	15	9	6	15	13,09	1,963
K	130	8	40	24	19	40	35,56	5,022
KPD	130	9	45	27	23	45	39,45	4,924
Valid N (listwise)	130							

Sumber :Data Primer (2019)

Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum dan *mean* dari kisaran aktual lebih besar daripada kisaran teoritis. Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean pada kisaran aktual yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, tanggapan responden baik.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO MSA	Butir Pernyataan	Loading Factor	Keterangan
Transparansi	0,882 > 0,50	T1	0,870	Valid
		T2	0,854	
		T3	0,926	
		T4	0,871	
		T5	0,878	
		T6	0,939	
		T7	0,920	
		T8	0,875	
		T9	0,875	
Akuntabilitas	0,871 > 0,50	A1	0,838	Valid
		A2	0,853	
		A3	0,881	
		A4	0,857	
		A5	0,808	

Variabel	KMO MSA	Butir Pernyataan	Loading Factor	Keterangan
		A6	0,829	
		A7	0,895	
		A8	0,848	
		A9	0,893	
<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,645 > 0,50	IR1	0,961	Valid
		IR2	0,800	
		IR3	0,964	
Kompetensi	0,825 > 0,50	K1	0,847	Valid
		K2	0,935	
		K3	0,937	
		K4	0,923	
		K5	0,953	
		K6	0,937	
		K7	0,933	
		K8	0,916	
Kinerja Daerah	0,860 > 0,50	KPD1	0,877	Valid
		KPD2	0,791	
		KPD3	0,886	
		KPD4	0,889	
		KPD5	0,862	
		KPD6	0,789	
		KPD7	0,879	
		KPD8	0,848	
		KPD9	0,855	

Sumber: "Data Primer (2019)"

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai KMO MSA dari variabel Transparansi, Akuntabilitas, *Intergovernmental Revenue*, Kompensasi, serta Kinerja Pemerintah Daerah > 0,50. Disimpulkan bahwa analisis faktor memenuhi persyaratan pertama. Selain itu, setiap item pada setiap variabel memiliki nilai *loading factor* > 0,50. Artinya, seluruh *component* dari setiap variabel memiliki *loading factor* yang besar sehingga dapat dikatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0,967	Reliabel
Akuntabilitas	0,954	
<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,897	
Kompetensi	0,975	
Kinerja Pemerintah Daerah	0,953	

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan Tabel 3, instrumen pada penelitian ini memiliki nilai reliabilitas sempurna. Selain itu, nilai *cronbach's alpha* pada variabel *Intergovernmental Revenue* berkisar anatar 0,70-0,90 menunjukkan reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
0,471	Normal

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *asymp sig (2-tailed)* sebesar 0,471 > alpha 0,05 artinya data berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi	0,114	Non-Heteroskedastisitas
Akuntabilitas	0,226	
<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,431	
Kompetensi	0,889	

Sumber: Data Primer (2019)

Pada Tabel 5, uji heteroskedastisitas didapatkan nilai sig > alpha 0,05. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai *absolute residual* pada persamaan model regresi artinya terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homoskedastisitas).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Transparansi	0,228	4,393	Non-Multikolinearitas
Akuntabilitas	0,181	5,524	
<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,167	5,993	
Kompetensi	0,274	3,644	

Sumber: "Data Primer (2019)"

Pada Tabel 6 hasil uji multikolinearitas didapatkan *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 pada persamaan regresi. Hal tersebut menunjukkan tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Disimpulkan bahwa asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<b>Variabel</b>	<b><i>Unstandardized Coefficients</i></b>		
	<b><math>\beta</math></b>	<b>t</b>	<b>Sig. t</b>
(Constant)	4,787	3,169	0,002
Transparansi	0,376	5,051	0,000
Akuntabilitas	0,198	2,360	0,020
<i>Intergovernmental Revenue</i>	0,490	2,103	0,037
Kompetensi	0,154	2,157	0,033
F	142,369		
Sig. F	0,000		
Adjusted R Square	0,814		

Sumber: "Data Primer (2019)"

$$KPD=4,787+0,376T+0,198A+0,490IR+0,154K+\epsilon$$

Pengujian koefisien determinasi *adjusted R square* memiliki nilai 0,814. Artinya variabel Transparansi, Akuntabilitas, *Intergovernmental Revenue*, dan Kompetensi mampu menjelaskan variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 81,4% dan sisanya yaitu 18,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak masuk dalam model penelitian. Selain itu, hasil uji simultan diperoleh nilai F sebesar 142,369 dengan nilai sig sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$ . Sehingga disimpulkan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, *Intergovernmental Revenue*, dan Kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil uji parsial atau uji t dapat diketahui bahwa Transparansi memiliki nilai sig  $0,000 < \alpha 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,376 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H1 terdukung yang berarti bahwa “Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”. Akuntabilitas memiliki nilai sig sebesar  $0,020 < \alpha 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,198 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H2 terdukung yang berarti bahwa “Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”. *Intergovernmental Revenue* memiliki nilai sig sebesar  $0,037 < \alpha 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,490 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H3 terdukung yang berarti bahwa *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kompetensi memiliki nilai sig sebesar  $0,033 < \alpha 0,05$  dengan nilai  $\beta$  sebesar 0,154 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H4 terdukung yang berarti bahwa “Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”.

### **Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian H1 menunjukkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan teori sinyal, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur perlu memperhatikan keterbukaan mengenai pengelolaan dan informasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program dengan melakukan beberapa tindakan transparansi pembiayaan yang meliputi penyediaan informatif, keterbukaan serta pengungkapan atas informasi anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian sejalan dengan Jitmau, dkk (2017), Setiawan dan Safri (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

### **Akuntabilitas Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian H2 menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan upaya pertanggung jawaban atas semua pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat, hal tersebut didukung oleh beberapa tindakan yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendorong kelancaran dari berjalannya program maupun kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dari unit organisasi pemerintahan dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, serta masyarakat. Hasil penelitian sejalan dengan Setiawan dan Safri (2016), Purnama dan Nadirsyah (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

### ***Intergovernmental Revenue* Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian H3 menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lombok Timur. Dana perimbangan selain digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga digunakan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pemerintah di Kabupaten Lombok Timur meningkatkan manfaat dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan memisahkan pengalokasian setiap dana tersebut di setiap bagian suatu unit organisasi pemerintahan yang sesuai dengan konsep *money follow function*. Hasil penelitian sejalan dengan Nugroho dan Prasetyo (2018), Nisa dan Nor (2018) serta Maiyora (2015) menunjukkan



---

*intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Kompetensi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian H4 menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Lombok Timur. Sehubungan dengan tingginya kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai pemerintahan maka pada peningkatan pelayanan yang diciptakan oleh pemerintah tersebut ikut meningkat, apabila kompetensi seorang pegawai dalam pemerintahan baik maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik dan sejalan dengan yang dijelaskan dalam teori sinyal. Hasil penelitian sejalan dengan Pujanira dan Taman (2017), Maheldi (2016), dan Safwan, dkk (2014) yang menyatakan kompetensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, *intergovernmental revenue*, dan kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pejabat pemerintah pada sekretariat, kantor, badan, dan OPD di Kabupaten Lombok Timur yang meliputi tingkat kepala baik kepala OPD, sekretaris, bendahara, kepala bidang/bagian, dan kepala subbidang/subbagian/seksi. Hasil penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, *intergovernmental revenue*, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan seluruh hipotesis terdukung serta sesuai dengan penjelasan dari teori keagenan dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pada masyarakat (*principals*) sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini yaitu tingkat generalisasi yang rendah dikarenakan penelitian hanya dilakukan pada OPD di Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari sekretariat, kantor, badan, maupun dinas. Kurang detailnya hasil penelitian mengenai kinerja pemda dikarenakan penelitian dilakukan hanya dengan kuesioner tanpa dilengkapi wawancara. Selain itu, penggunaan kuesioner dapat menghasilkan jawaban bias dari responden karena ketidakseriusan responden dalam menjawab pernyataan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Butar Butar, Sansaloni. 2014. "Implikasi Regulasi Pasar Modal terhadap Motif Manajemen Laba : Pengujian Berbasis Teori Pensinyalan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 11(1):99-119.
- Dirgayusa, I. Gede Putu, dan I. Made Sadha Suardikha. 2017. "Pengaruh Komponen Laporan Arus Kas Terhadap Return Saham Dengan Current Ratio Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19(2):1202-28.
- Fatimah, Siti. 2017. "Analisis Dana Perimbangan Kaitannya dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2016." *Ekonombis* 3(2):61-78.
- Fernandes, Wanda. 2015. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar." *JOM Fekom* 2:1-13.
- Hastoro, Handoko A., dan Sunardi Sunardi. 2016. "Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18(1):53.
- Isufaj, Mentor. 2014. "Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109:459-63.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics*.

- 
- Jitmau, Fanny, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(1):276–85.
- Kholmi, Masiyah. 2010. "Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi." *Ekonomika Bisnis* 02(02):357–70.
- Korompot, Riska, dan Jessy Warongan. 2017. "Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi." *Accountability* 6(2):9.
- Latham, Gary P., dan Edwin A. Locke. 2006. "Enhancing the Benefits and Overcoming the Pitfalls of Goal Setting." *Organizational Dynamics* 35(4):332–40.
- Maheldi, Wahyu. 2016. "Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar)." *JOMFekom* 3(1):2525–39.
- Maiyora, Gita. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera) Oleh:" *JOM Fekon* 2(2):1–15.
- Mudhofar, Kurniatul, dan Afrizal Tahar. 2016. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17(2):176–85.
- Ningsih, Silvia, Afridian Wirahadi, dan Amy Fontanella. 2018. "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 13(1):1–16.
- Nisa, Fitriatun, dan Wahyudin Nor. 2018. "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Determinasi Intergovernmental Revenue, Kemakmuran dan Ukuran Pemerintah." *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Novalia, Fitri, dan Marsellisa Nindito. 2016. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Economic Value Added Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 11(2):1–13.
- Nugroho, Tatas Ridho, dan Novi Eko Prasetyo. 2018a. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur." *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 7(1):27.
- Pujanira, Putriasri, dan Abdullah Taman. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 6(2).
- Purnama, Fifit, dan Nadirsyah. 2016. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(2):01–15.
- Putra, Andi Permana, Akram Akram, dan Hermanto Hermanto. 2018. "Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2(2):271.
- Ratih, I. Dewa Ayu, dan I. Gusti Ayu Eka Damayanthi. 2016. "Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Sebagai Variabel Pembederasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(2):1510–38.
- Safwan, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah. 2014. "Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya." *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 7(1):133.
- Setiawan, Harry, dan Muhammad Safri. 2016. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(1):51–72.
-

- Simbolon, Henny Agnecia Uliarta, dan Christophorus Heni Kurniawan. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah." *MODUS* 30(1):54–70.
- Spence, Micheal. 1973. "Job Market Signaling." *The Quarterly Journal of Economics* 87(3):355–74.
- Wiguna, Made Budi Sastra, Gede Adi Yuniartha, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng." *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 3(No. 1):1–12.
- Yuliafitri, Indri, dan Asma Nur Khoiriyah. 2016. "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)." *Islamiconomic: Jurnal Eoknomi Islam* 7(2):205–18.
- Yuliawan, Komang Trisna. 2016. "Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Menjelang Initial Public Offering Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia ABSTR." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14:1396–1422.